

NOMI
AN

**ANALISIS HARGA BERAS SERTA DAMPAKNYA PADA
PRODUSEN DAN KONSUMEN DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Oleh

THOMAS JULFENRI PURBA



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2005

332.632 2207
Pur
a
2005

**ANALISIS HARGA BERAS SERTA DAMPAKNYA PADA
PRODUSEN DAN KONSUMEN DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



R. 12184

Ng. 12966

Oleh

THOMAS JULFENRI PURBA



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2005

SUMMARY

THOMAS PURBA. Rice Price Analyse And its Impact for Producer and Consumer in South Sumatra Province (Supervised by NAJIB ASMANI and MARYANAH HAMZAH).

The purposes of this research are comparing rice prices in South Sumatra, through method of price ratio. Rice price to be compared by, were autarki price (PA), local rice price (PL), and Indonesia price (PI). Identifying form of price protection for producer and consumer, and also calculate surplus total of missing consumer and producer which effected by policy. Data weared were data of rice price from some rice type commercialized in region of South Sumatra.

Decision method of concerning price ratio formulated in hypothetical method with form of case. Third of price ratio to be tested were ratio of Indonesian rice price (PI) at autarki price (PA) or ratio PI/PA ; ratio of local rice price (PL) at autarki price (PA) or ratio PL/PA ; ratio of local rice price (PL) at Indonesia rice price (PI) or ratio PL/PI .

Pursuant to data obtained and have been processed explainable to hence mount the rice price during five year (1999-2003) in South Sumatra Province. Third of rice price processed namely Autarki price (PA), local price (PL), and Indonesian price (PI), mean value of them during five year are : mean of PI equal to Rp. 2505; mean of PL equal to Rp. 2438; mean of PA equal to Rp. 2754. Value of PI/PA ratio equal to 0,820; meaning rice producer in other dissimilar area yield this commodity with cheaper cost relative than cost needed by rice producer in South Sumatra. Value of PL/PA ratio equal to 0,854 and value of PL/PI ratio equal to 0,960. Related

to mathematical method, it can be connected as equation $PL < PI < PA$, which sequence from lowest is local rice price, Indonesia rice price and last autarki price.

That Price difference caused by government intervence which wish to provide rice commodity from outside market into local market at cheaper price. But this target have to be accompanied by cost fee in the form of tariff import or expense of move in. This cost make's price gap between local market and outside market.

Protection given by government directly or indirectly which affected to rice price in local market; *first*, rice policy by Instruction of President Republic of Indonesia, Number 9/2002 about floor price of Dry Shell of rice Purchasing Mill hold by Bulog; *second*, Repeal of Letter of credit (L/C) rice Levyng, what indirectly decrease rice price in local market if accomplishment of rice stock handle by pure market mechanism. Total value of missing surpluss from consumer and producer effect by this policy equal to 288.060.524,44 rupiah.

RINGKASAN

THOMAS PURBA. Analisis Harga Beras Serta Dampaknya Pada Produsen dan Konsumen di Provinsi Sumatera Selatan (Dibimbing oleh NAJIB ASMANI dan MARYANAH HAMZAH).

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan harga beras di Provinsi Sumatera Selatan melalui metode rasio harga. Harga beras yang akan dibandingkan adalah harga beras autarki (PA), harga beras lokal (PL), dan harga beras Indonesia (PI). Mengidentifikasi bentuk perlindungan harga bagi produsen dan konsumen, serta menghitung besar surplus produsen dan konsumen yang hilang akibat kebijakan tersebut. Data yang dipakai adalah data harga beras dari beberapa jenis beras yang umum diperdagangkan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Kaidah ketetapan mengenai rasio harga dijabarkan dalam bentuk kaidah hipotetis dalam bentuk kasus. Ketiga rasio harga yang akan diuji adalah rasio harga beras Indonesia (PI) dengan harga autarki (PA) atau rasio PI/PA ; rasio harga beras lokal (PL) dengan harga beras autarki (PA) atau rasio PL/PA ; rasio harga beras lokal (PL) dengan harga beras Indonesia (PI) atau rasio PL/PI .

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan telah diolah maka dapat dijelaskan tingkat harga beras selama lima tahun (1999-2003) di Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga harga beras yang diolah yakni harga PA, harga PL, dan harga PI dalam bentuk rata-rata selama lima tahun adalah sebagai berikut : rata-rata harga PI sebesar Rp. 2505; rata-rata harga PL sebesar Rp. 2438; rata-rata harga PA sebesar Rp. 2754. Nilai rasio PI/PA sebesar 0,820 yang berarti produsen beras di daerah lain menghasilkan komoditi ini dengan biaya relatif lebih murah daripada biaya yang

diperlukan oleh produsen beras di Sumatera Selatan. Nilai rasio PL/PA sebesar 0,854 dan nilai rasio PL/PI sebesar 0,960. Berdasarkan kaidah matematis dapat dihubungkan sebagai persamaan $PL < PI < PA$, urutan harga dari yang paling rendah adalah harga beras lokal, harga beras Indonesia dan harga harga autarki.

Perbedaan harga itu terjadi karena campur tangan pemerintah yang ingin menyediakan komoditi beras dari luar pasar ke dalam pasar lokal dengan harga murah. Namun tujuan ini harus disertai dengan mengeluarkan biaya dalam bentuk tarif impor atau biaya *move in*. Biaya inilah yang menyebabkan perbedaan harga di pasar lokal dengan harga di luar pasar.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang terkait langsung atau tidak langsung sehingga mempengaruhi harga beras di pasar lokal adalah *pertama*, kebijakan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri oleh Bulog; *kedua*, Pencabutan *Letter of credit* (L/C) Pengadaan beras, yang secara tidak langsung menurunkan harga beras di pasar lokal bilamana pemenuhan kebutuhan beras diserahkan pada pasar. Nilai total surplus produsen dan konsumen yang hilang akibat kebijakan tersebut adalah sebesar 288.060.524,44 rupiah.

**"JUST GIVE ME IMAGINATION,
AMBITIOUS, COMPETITION AND WAY
I'LL LEAD THIS COUNTRY"**

Kupersembahkan untuk :

*Kedua orang tuaku, Mr. Edy Purba dan
Ny. T. Siahaan dan keempat saudaraku
Lia, Ery, Ely, dan Mei Elfrida.*

*Kepada sejawatku Rudy dan "GAZZ
(gank anak 99)"*

*Saudara, teman, keluarga, dan personal
yang pernah berada dalam jalur
perjalanan hidupku. Terima kasih untuk
semuanya, semoga Tuhan tetap
menyertai kita.*

**ANALISIS HARGA BERAS SERTA DAMPAKNYA PADA PRODUSEN
DAN KONSUMEN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh

THOMAS JULFENRI PURBA

SKRIPSI

**sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Pertanian**

Pada

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2005

Skripsi
ANALISIS HARGA BERAS SERTA DAMPAKNYA PADA
PRODUSEN DAN KONSUMEN DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Oleh
Thomas Julfenri Purba
05993104031

telah diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Pertanian

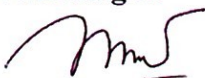
Mengetahui :

Pembimbing I



Ir. H. M. Najib Asmani, M. Si

Pembimbing II



Ir. Maryanah Hamzah, M. S

Indralaya, 2 Maret 2005

Fakultas Pertanian

Universitas Sriwijaya

yu **Dekan,**



Prof. Dr. Ir. Benjamin Lakitan, M. Sc
NIP. 131292 299

Skripsi berjudul "Analisa Harga Beras Serta Dampaknya Pada Produsen Dan Konsumen Di Provinsi Sumatera Selatan" oleh Thomas Julfenri Purba telah dipertahankan di depan Komisi Penguji pada tanggal 30 November 2004.

Komisi Penguji

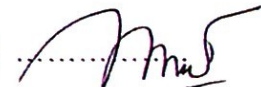
1. Ir. H. M. Najib Asmani, M.Si

Ketua

()

2. Ir. Maryanah Hamzah, M.S

Sekretaris

()

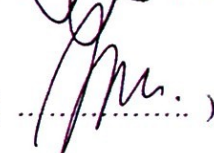
3. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Si

Anggota

()

4. Ir. Mirza Antoni, M.Si

Anggota

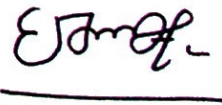
()

Mengetahui
Ketua Jurusan
Sosial Ekonomi Pertanian



Ir. Maryati Mustofa Hakim, M.Si
NIP 131 269 263

Mengesahkan
Ketua Program Studi Agribisnis



Ir. Elisa Wildayana, M.Si
NIP 131 691 050

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data dan informasi yang disajikan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan dengan jelas sumbernya, adalah hasil penelitian saya sendiri dan belum pernah atau tidak sedang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan atau gelar yang sama di tempat lain.

Indralaya, 3 Februari 2005

Yang membuat Pernyataan

Thomas Julfenri Purba

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Besitang, pada tanggal 19 Februari 1981. Putra dari pasangan Edi Purba dan Tumiar br. Siahaan, merupakan anak kedua dari lima bersaudara.

Penulis menyelesaikan studi pendidikan sekolah dasar pada Tahun 1993 di SD Negeri No. 173582 Sigumpar, Kecamatan Silaen. Sekolah lanjutan tingkat pertama pada Tahun 1996 di SMP Negeri Sigumpar, Kecamatan Silaen. Sekolah lanjutan tingkat atas diselesaikan pada Tahun 1999 di SMU Negeri Dua Balige.

Pada bulan September Tahun 1999, penulis tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, jurusan Sosial Ekonomi, program studi Agribisnis melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).

Penulis melaksanakan Praktik Lapangan pada bulan Oktober Tahun 2003 dengan judul “ Tinjauan Teknis Pembibitan Jeruk Manis (*Citrus aurentium*. L.) dengan Okulasi di Desa Tanjung Seteko.

Penulis pernah menjadi Asisten Luar Biasa pada mata kuliah Manajemen Agribisnis pada semester genap tahun ajaran 2002/2003. Penulis aktif mengikuti kegiatan dan kejuaraan olahraga baik dalam lingkungan Universitas ataupun di luar lingkup universitas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat yang kita terima dalam setiap perjalanan hidup yang kita lalui, termasuk juga kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini berjudul "*Analisis Harga Beras serta Dampaknya terhadap Produsen dan Konsumen di Propinsi Sumatera Selatan*". Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Peneliti mengambil topik permasalahan beras karena komoditi ini memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir. H. M. Najib Asmani, M.Si selaku pembimbing utama dalam penelitian ini, dan Ibu Ir. Maryanah Hamzah, M. S sebagai pembimbing pembantu yang telah memberi bimbingan, arahan dan segala petunjuknya dalam penyelesaian penelitian ini.

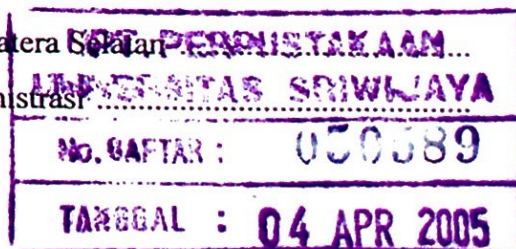
Akhirnya penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang positif demi tercapainya tujuan penelitian yang terbaik sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Indralaya, 3 Februari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9
II. KERANGKA PEMIKIRAN	10
D. Tinjauan Pustaka	10
1. Konsep Harga	10
2. Konsep Ketahanan Pangan	13
3. Identifikasi terhadap kebijakan perlindungan harga	14
4. Pola Pengadaan Gabah	18
5. Kriteria Dampak Harga beras	19
E. Model Pendekatan	20
F. Hipotesis	22
G. Batasan-batasan	22
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	25
H. Tempat dan Waktu	25
I. Metode Penelitian	25
J. Metode Pengumpulan Data	25
K. Metode Pengolahan Data	26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Keadaan Umum Provinsi Sumatera Selatan	28
1. Letak Geografis dan Administrasi	28



2. Keadaan Alam	29
3. Tanah	31
4. Keadaan Pertanian	32
B. Situasi Perberasan Nasional	36
C. Analisa Dampak Harga	38
D. Identifikasi Kebijakan Pemerintah	43
E. Kehilangan Surplus Produsen dan Konsumen	44
F. Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	45
V. KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kriteria mutu gabah untuk pembelian Bulog	2
2. Komponen Mutu Beras	3
3. Perbandingan kebijakan perberasan oleh pemerintah di beberapa Negara Asia	17
4. Taksonomi Harga Autarki (PA), Harga Domestik (PD) dan Harga di Indonesia (PI) pada berbagai pola perdagangan	21
5. Pengujian Hipotesis Perdagangan beras di Sumatera selatan	22
6. Jenis tanah dan penyebarannya di Sumatera Selatan	31
7. Luas Panen, Rata-rata, Total dan Pertumbuhan Produksi Padi Indonesia	36
8. Situasi Perberasan Indonesia Tahun 1999 – 2003 (Ribuan Ton)	37
9. Situasi Perberasan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999 – 2003.....	37
10. Faktor-faktor pada penghitungan rasio harga PI/PA.....	40
11. Faktor-faktor pada penghitungan rasio harga PD/PA	41
12. Faktor-faktor pada penghitungan rasio harga PD/PI	42
13. Perbedaan harga beras PD dengan harga Inpres berdasarkan tahun berlakunya.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kebijakan harga minimum atau harga dasar (HD)	11
2. Hubungan antara PL, PI, PA.....	12
3. Negara produsen beras dunia tahun 2003	14
4. Perkembangan Harga rata-rata untuk semua jenis Beras per bulan di Sumatera Selatan selama bulan Januari-Desember Tahun 2003	39
5. Perkembangan Harga untuk semua jenis Beras per tahun di Sumatera Selatan Tahun 1999 – 2003	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	50
2. Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Total Produksi Padi per Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999-2003.....	51
3. Rata-rata, Total, dan Pertumbuhan Produksi Padi Indonesia	52
4. Kebutuhan Beras menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan	53
5. Harga Rata-rata Beras Medium dan IR di Indonesia	54
6. Perkembangan Harga beberapa Jenis Beras di Kabupaten/ kota di Sumatera Selatan	55
7. Model Penyelesaian Harga Beras dengan Tabulasi.....	57
8. Analisis Dampak Harga Beras Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999 – 2003	59
9. Perhitungan Nilai Total Surplus Hilang	60
10. Grafik Harga Autarki Beras (PA)	61
11. Grafik Harga Beras Nasional (PI)	62
12. Grafik Harga Beras Domestik Sumatera Selatan (PD)	63
13. Grafik Perkembangan harga PA, PI, PD	64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Arifin (2001), sebagai bahan pangan, beras masih merupakan kebutuhan yang mendasar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia hingga saat ini. Meskipun ada sebagian masyarakat, seperti penduduk kota mengkonsumsi pangan selain beras seperti roti, mie, namun peran beras sebagai kebutuhan pokok masih sulit digantikan. Pengaruh ketersediaan pangan terutama beras akan sangat nyata terlihat dalam kehidupan sosial ekonomi kita. Dengan demikian jumlah beras yang tersedia berikut harganya sudah seharusnya menjadi perhatian utama para pelaku pemerintahan di negara ini.

Dalam satu dasawarsa ini telah dirancang berbagai kebijakan menyangkut masalah pangan di dunia, termasuk Indonesia. Kesepakatan GATT – *putaran Uruguay* (Agustus, 1994), penghapusan tarif oleh *World Trade Organization* (WTO) yang dibuat sejak tahun 1997 – 2000, persiapan *ASEAN Free Trade Assosiation* (AFTA) tahun 2003, perdagangan bebas tahun 2010 untuk Asia Pasifik dan tahun 2020 untuk dunia. Indonesia sendiri melakukan beberapa perubahan penting menyangkut kebijakan pangan antara lain perubahan lembaga Badan Urusan Logistik (BULOG) dari BUMN ke bentuk Perum. Tentunya perubahan ini akan membawa dampak berbeda terhadap kelangsungan kegiatan pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia. Perbedaan cara kerja yang baru perlu segera pengawasan bilamana nantinya perubahan tersebut tidak bermanfaat (Arifin, 2001).

Menurut Sawit (2003), setidaknya-tidaknya ada dua dasar pertimbangan yang dipakai pemerintah dalam penetapan harga dasar gabah (HDG) yang baru seperti tertuang dalam Inpres No. 9/2002. Pertama, harga dasar gabah sebesar Rp 1.725/Kg GKG ditujukan untuk memacu produksi beras dalam negeri, dan kedua peningkatan pendapatan petani padi. Berikut daftar harga gabah dan komponen mutu beras yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Perum BULOG (Tabel 1 dan 2).

Tabel 1. Kriteria mutu gabah untuk pembelian Bulog

No.	Kriteria mutu gabah	Harga Gabah (Rp/ Kg)		
		GKG	GKS	GKP
		1.725	1.409	1.268
1.	Kadar Air (%)	maks. 14	18	25
2.	Hampa Kotoran (%)	maks. 3	6	10
3.	Butir Hijau/ Mengapur (%)	maks. 5	7	10
4.	Butir Kuning Rusak (%)	maks. 3	3	3
5.	Butir Merah (%)	maks. 3	3	3

Keterangan :
 GKG = Gabah Kering Giling
 GKS = Gabah Kering Simpan
 GKP = Gabah Kering Panen

Sumber : Bulog, 2003. Beras Pengadaan Dalam Negeri

Persyaratan Umum Kualitas Beras Pengadaan Dalam Negeri Tahun 2002

1. Bebas hama dan penyakit yang hidup;
2. Bebas bau apek, asam atau bau-bau asing lainnya;
3. Bersih dari campuran dedak dan katul;
4. Bebas dari tanda-tanda adanya bahan kimia yang membahayakan baik secara visual maupun secara organoleptik.

Label 2. Komponen Mutu Beras

No	Komponen Mutu		Satuan	Mutu III SNI *)	Mutu IV SNI **)
1.	Derajat Sosoh	(min)	%	95	95
2.	Kadar Air	(maks)	%	14	14
3.	Butir Kepala	(min)	%	84	78
4.	Butir Utuh	(min)	%	40	35
5.	Butir patah	(maks)	%	15	20
6.	Butir Menir	(maks)	%	1	2
7.	Butir Merah	(maks)	%	1	3
8.	Butir Kuning/ rusak	(maks)	%	1	3
9.	Butir Mengapur	(maks)	%	1	3
10.	Butir Asing	(maks)	%	0.02	0.02
11.	Butir Gabah	(maks)	Butir/100 g	1	1
12.	Campuran Varietas Lain	(maks)	%	5	5

Keterangan : *) Modifikasi SNI No.01-6128-1999 pada Derajat Sosoh dari 100% menjadi 95%.

**) Modifikasi SNI No.01-6128-1999 pada Butir Patah dari 15% menjadi 20%, penambahan komponen Beras Kepala 78%.

Sumber : Bulog, 2003. Beras Pengadaan Dalam Negeri

Secara umum permasalahan beras di Sumatera Selatan seperti yang dimunculkan dalam seminar Asosiasi Pengadaan Pangan dan Pertanian Sumatera Selatan (AP₃SS) bulan Juni 2004 diuraikan sebagai berikut :

A. Permasalahan petani

1. Tidak tersedianya modal untuk membeli pupuk pada waktu pengolahan lahan, terjerat tengkulak.
2. Menanam varietas tertentu secara beramai-ramai, melihat mana harga yang baik di musim lalu, sehingga terjadi kelebihan jumlah gabah/ beras yang sama ketika panen, berakibat rendahnya harga jual.

3. Masih ada yang kesulitan mencari benih yang bersertifikat, akibatnya menggunakan benih dari hasil sawah sendiri, yang berpengaruh terhadap produktivitas.
 4. Tahun 2004 BULOG membuka pengadaan gabah pada saat menjelang panen, petani tidak bisa mensuplai, dan pada saat panen raya ada keinginan melaksanakan move in.
 5. Sering panen sebelum gabah matang sempurna untuk menghindari pencurian dan anjloknya harga, karena harga menjelang panen lebih tinggi dibanding ketika panen.
- B. Permasalahan PPK dan Pedagang Desa
1. Kesulitan menampung gabah petani karena terbatasnya fasilitas penjemuran/ pengeringan dan alat perontok, yang berdampak pada rendahnya mutu beras.
 2. Fasilitas penggilingan dan penyosoh beras yang belum maksimal.
 3. Terbatasnya sarana pemasaran beras saat musim panen raya, sehingga terjual dibawah harga yang wajar.
 4. Belum menikmati harga jual yang sesuai Inpres No. 9/ 2000 dan Dana Lumbung Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), karena pada saat kelebihan produksi jatah relatif kecil dinikmati oleh PPK, sebab sulit memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan BULOG, sehingga 85 % jatah BULOG diisi oleh pedagang besar.
 5. Bulan Februari 2004 tidak bisa memasok ke BULOG karena kran pengadaan dibuka sebelum panen.
 6. Masuknya beras Raskin di daerah sekitar sentra produksi dengan harga Rp. 1.500 per kilogram.

C. Permasalahan Pedagang Beras Olahan

1. Beras yang dibeli mutunya rendah, dalam grading dan standarisasi perlu biaya pengolahan yang tinggi.
2. Infrastruktur yang jelek sehingga ongkos angkut tinggi.
3. Terbatasnya modal pada saat kelebihan produksi sehingga kapasitas beras/ gabah yang ditampung sangat terbatas.
4. Data beras yang kurang akurat sepanjang tahun, termasuk mengenai surplus beras tetapi pada masa paceklik ada beras masuk dari luar.

D. Permasalahan Dana Talangan LUEP

1. Penyaluran Dana Talangan 2004 menurun sebanyak sekitar 52 %, dari Rp. 12,015 milyar Tahun 2003 menjadi Rp. 6,35 milyar.
2. Adanya keterlambatan pengembalian dana talangan dari pemakai tersebut disebabkan kurang tepatnya sasaran dan penggunaannya.
3. Kurangnya pengawasan oleh instansi terkait terhadap penggunaan dana tersebut oleh mitra kerjanya.

E. Permasalahan BULOG

1. Membuka kran pengadaan gabah/ beras dalam waktu relatif singkat, sehingga PPK tidak bisa mensuplai gabah/ beras karena tidak tersedia stok di gudang sementara petani belum panen.
2. Move in/ impor terjadi pada waktu panen raya sehingga tidak bisa menyerap gabah/ beras petani dengan alasan mutu jelek.
3. Kontraktor pemasok beras lebih berpihak kepada pengusaha tertentu, PPK/ KUD yang jumlahnya berkisar 48 menikmati pengadaan hanya 15 %, dan selebihnya 85 % dinikmati oleh kontraktor yang tergolong besar.

4. Tim seleksi yang terdiri dari 10 orang BULOG dan 10 orang instansi terkait dalam penetapan persyaratan tidak melakukan verifikasi ke lapangan.
5. Belum disosialisasikannya peran BULOG menjadi Perum sejak 1 Januari 2003, dan apakah setelah menjadi Perum Inpres No. 9 Tahun 2002 masih relevan.

Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan ketahanan pangan telah menjadi komitmen pemerintah yang ditunjukkan oleh adanya butir ketahanan pangan yang tertuang dalam Undang-Undang Pangan (UU No. 7 tahun 1996) dan tercantum dalam GBHN 1999-2004. Bentuk komitmen pemerintah ini memberi makna bahwa pemerintah berupaya memenuhi kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi setiap warganya. Terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan salah satu unsur pendukung program pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (Sawit, 2001).

Menurut Soekirman (2002), rasio konsumsi pangan aktual yang mencakup aspek kuantitas dan kualitas mutu (*nutrient contents*) dengan konsumsi normatif dapat merefleksikan derajat ketahanan pangan rumah pangan. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI menyarankan bahwa angka kecukupan konsumsi energi adalah 2.200 kkal/kapita/hari. Namun untuk dikatakan sebagai tingkatan sejahtera satu keluarga memerlukan 20 Kg per keluarga per bulan, walaupun itu masih 40-60 % dari kebutuhan beras mereka per bulan. Dalam pelaksanaan program bantuan pangan oleh pemerintah harga beras murah dijual sebesar Rp. 1.000 per kilogram. Harga itu merupakan harga yang telah disubsidi dari harga yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen yakni sebesar Rp 1.804 per kilogram.

Selanjutnya Sawit (2001) menyatakan, Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu pendekatan penentuan tingkat pencapaian mutu konsumsi pangan telah

mencakup aspek keseimbangan zat gizi dari pola konsumsi pangan rumah tangga. Konsumsi pangan yang sesuai dengan PPH berarti sudah memenuhi aspek keseimbangan gizi (*nutricional balance*), cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestybility*), daya terima social (*acceptyability*), kuantitas dan aspek kecukupan gizi (*nutricional adequancy*).

Menurut Arifin (2001), kebijakan pangan di Indonesia benar-benar berada di persimpangan jalan. Setelah sekian lama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memperoleh desakan cukup besar untuk segera memperbaharui format kebijakan bidang pangan, kebijakan harga dasar gabah (HDG) yang baru diperkirakan tidak akan mampu efektif mencapai tujuannya. Masalah harga beras ini dapat dianalisa dengan rasio harga autarki. Menurut Kadariah (1994), tingkat harga autarki adalah harga keseimbangan yang terbentuk dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Dengan metode rasio autarki ini arah kebijakan pemerintah mengenai harga beras di Sumatera Selatan akan dapat dijelaskan dengan baik.

1) Harga Gabah

Berdasarkan hasil pemantauan BPS terhadap harga gabah produsen pada bulan Agustus 2003, yang dilakukan pada 486 transaksi/ observasi dengan rincian GKP 201 (59,88%), GKS 136 (27,98%) dan GKG 6 (1,23%) serta gabah diluar kelompok kualitas sebanyak 53 (10,91%) observasi. Seluruh observasi tersebut tersebar di 15 propinsi. Hasil observasi menunjukkan bahwa rata-rata harga gabah di tingkat petani dan penggilingan pada bulan ini mulai membaik. Rata-rata harga gabah di tingkat penggilingan GKP adalah Rp. 1.268,28 per kg (3,11% di atas harga referensi), GKS Rp. 1.409,88 per kg (6,01% di bawah harga referensi) dan GKG Rp. 1.725,-per kg (1,47% di atas harga referensi).

2) Harga Beras

Di tingkat eceran harga beras medium di kota-kota besar di Indonesia mulai mengalami kenaikan setelah selama Maret sampai dengan Juli 2003 harga beras terus menurun. Harga beras pada Agustus 2003 mencapai Rp. 2.710 per kg atau naik 0,40% dibanding bulan Juli 2003. Kenaikan terjadi di Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta. Sedangkan daerah lain masih relatif stabil. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan harga gabah pada Agustus 2003 ini (BPS, 2003).

Untuk tingkat grosir di Jakarta (data dari Pasar Induk Cipinang), harga beras pada Agustus mulai mengalami kenaikan. Setelah stabil sejak Mei pada tingkat harga Rp. 2.650 per kg IR II, maka per tanggal 22 Agustus 2003, tercatat harga beras IR II naik Rp. 50 per kg menjadi Rp. 2.700. Demikian juga dengan beras IR III naik dari Rp. 2.400 per kg menjadi Rp. 2.450. Di beberapa kota besar di Indonesia, rata-rata harga beras medium juga mengalami kenaikan. Harga rata-rata pada Agustus 2003 mencapai Rp. 2.603,89 atau naik 0,58% dari bulan Juli 2003 (BPS, 2003).

3) Harga Luar Negeri

Rata-rata beras Thailand pada Agustus 2003 turun 2,12% dibanding bulan sebelumnya menjadi US\$ 184,75 per ton FOB untuk Thailand 15%. Sedangkan untuk beras Thailand 25% hanya US\$ 178,25 per ton. Meskipun kurs rupiah naik dari Rp. 8.336 per US\$ menjadi Rp. 8.503 per US\$, namun dalam perhitungan parity impor untuk beras Thailand 15% pada Agustus mengalami penurunan Rp. 2,74 per kg menjadi Rp. 2.203,21 per kg tingkat grosir (BPS, 2003).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dianalisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kemana sasaran utama kebijakan harga beras di Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pemerintah?
2. Bagaimana bentuk perlindungan harga yang diberikan terhadap produsen atau konsumen melalui kebijaksanaan harga beras di Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pemerintah ?
3. Berapa total surplus produsen dan konsumen di Sumatera Selatan yang hilang akibat kebijaksanaan harga yang ditetapkan oleh pemerintah ?

C. Tujuan

Dari permasalahan yang telah diangkat seperti diatas maka secara umum penelitian ini bertujuan :

1. Untuk membandingkan harga beras yang ditetapkan melalui kebijaksanaan pemerintah dengan harga beras yang dihitung melalui rasio harga autarki, sehingga terlihat sasaran kebijakan yang diambil pemerintah.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan harga di Provinsi Sumatera Selatan yang diberikan oleh pemerintah terhadap produsen atau konsumen.
3. Untuk menghitung total surplus produsen dan konsumen yang hilang akibat kebijakan harga beras yang ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 2001. Kebijakan Beras di Persimpangan Jalan. *Majalah Pangan*. Nomor : 36/X/Januari/ 2001. Hal. 23 – 29.
- Badan Urusan Logistik (BULOG). 2003. Standar Kualitas Gabah/ Beras Pengadaan Dalam Negeri. Palembang.
- Biro Pusat Statistik (BPS). 2002. Sumatera selatan Dalam Angka 2002. Palembang.
- Biro Pusat Statistik (BPS). 2003. Indikator Harga Beras dan Beras Pengadaan Dalam Negeri. Palembang
- Daniel, M. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta.
- J. B. Kristiadi. 2001. Sistem Ketahanan Pangan Dalam Wawasan Otonomi Daerah. *Majalah Pangan*. Nomor : 36/X/Januari 2001. Hal 12 – 15.
- Kadariah. 1994. Teori Eonomi Mikro. Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moelock, F. A. 2000. Gizi sebagai Basis Pengembangan SDM menuju Indonesia Sehat 2010, dalam R.Thaha (Eds.), *Pembangunan Gizi dan Pangan dari Perspektif Kemandirian Lokal*. Pergizi Pangan Indonesia dan Crescent. Bogor
- Rasahan, C. A. 1997. Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi Era Perdagangan Bebas. *Agro-Ekonomika*. Nomor : 2/ XXVII/ Oktober 1997. Hal 15 – 25.
- Sawit, M. Husein. 2002. Beras untuk Keluarga Miskin : Sebuah Perlindungan Sosial. *Majalah Pangan*. Nomor : 38/XI/Januari 2002. Hal. 10-19.
- Sawit, M. Husein. 2003. Pengadaan Gabah BULOG dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (I.PMD). *Majalah Pangan*. Nomor : 40/XII/Januari 2003. Hal. 34 – 40.
- Sjahrir. 1995. Formasi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sjarkowi, F. 1992. Metodologi Penelitian. Fakultas Pertanian. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Soekirman. 2002. Peran Gizi Dalam Pencanaan Sumber Daya Manusia (SDM).
Majalah Pangan. Nomor : 38/XI/Januari 2002. Hal 3 – 9.

Teguh, M. 1999. Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasinya. PT Raja
Grafindo Persada. Jakarta.